

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pandemi COVID-19 merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dalam situasi seperti ini tentu berbagai institusi Pemerintah, non Pemerintah, dan masyarakat ingin berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya dalam bentuk sumbangan pemikiran untuk perbaikan strategi penanganan COVID-19. Gugus Tugas percepatan penanganan COVID-19 Kementerian PPN/Bappenas menyajikan temuan berharga yang merefleksi seluruh penanganan COVID-19 dan mengambil pembelajaran dari penanganan tersebut sebagai masukan untuk peningkatan kapasitas penanganan pandemi COVID-19 dan sebagai alat navigasi bagi perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas, baik di sektor kesehatan maupun non-kesehatan (Bappenas, 2021).

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan dan dampak yang besar pada dunia, termasuk Indonesia. Dampak tersebut berpengaruh signifikan baik di bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Dari penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia dan di dunia, terdapat pembelajaran berharga bahwa Indonesia harus terus berbenah dalam berbagai bidang pembangunan dan respon lebih awal terhadap pandemi menentukan keberhasilan dalam pengendaliannya (Bappenas, 2021).

Perencanaan dan penganggaran berbasis bukti dalam percepatan penanganan COVID-19 akan meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi pandemi penyakit di masa mendatang (Ivan Aditya Mileniawan,

2021). Indonesia harus terus meningkatkan upaya pencegahan, deteksi, dan respons pandemi COVID-19 secara lintas sektor. Salah satu hal yang sangat krusial adalah ketersediaan dan kelengkapan bukti sebagai alat navigasi pengambilan kebijakan.

Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan Studi Pembelajaran Penanganan COVID-19 pada berbagai bidang utama, seperti kesehatan, manajemen respons, inovasi teknologi, ekonomi, pendidikan, agama, sosial-budaya, perlindungan perempuan-anak-pemuda dan perlindungan sosial (Jamroni, 2021). Fokus studi ini mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan, serta menghadirkan rekomendasi yang relevan bagi penanganan COVID-19 di Indonesia. Berbagai temuan dikemas dengan analisis yang tajam, bahasa yang concise, dan rekomendasi yang bersifat operasional (Bappenas, 2021).

Sebagaimana telah diketahui bahwasanya penanganan pandemi COVID-19 melibatkan banyak pihak tidak terkecuali institusi. Mulai dari institusi pusat sampai daerah bekerjasama dan berkesinambungan dalam upaya optimalisasi vaksinasi. Hal ini penting karena dalam upaya vaksinasi institusi mempunyai kedudukan yang sentral yang berperan dalam menentukan regulasi yang mengikat masyarakat dalam upaya menuntaskan program vaksinasi. Peran yang baik juga harus didukung dengan upaya yang optimal agar tujuan dari regulasi terkait tepat sasaran dan maksimal.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mempunyai perhatian khusus terhadap peran institusi dalam upaya vaksinasi sehingga penulis mengajukan judul “PERAN PEMERINTAH DESA PANDAK DALAM

UPAYA OPTIMALISASI VAKSINASI”, dimana studi kasus akan dilaksanakan di Desa Pandak Kecamatan Balong.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana peran pemerintah desa pandak dalam upaya optimalisasi vaksinasi?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui program vaksinasi di Desa Pandak Kecamatan Balong.

### **2. Tujuan Khusus**

Untuk mengidentifikasi peran pemerintah desa pandak dalam upaya optimalisasi vaksinasi.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Bagi Praktisi**

- a. Sebagai sarana mengidentifikasi peran pemerintah desa dalam upaya optimalisasi vaksinasi.
- b. Sebagai identifikasi peran pemerintah desa pandak dalam upaya optimalisasi vaksinasi.

### **2. Manfaat Bagi Akademis**

- a. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang optimalisasi vaksinasi.
- b. Sebagai penambah pengetahuan bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Ponorogo

### **3. Manfaat Bagi Instutusi Terkait**

- a. Sebagai landasan dalam melakukan kebijakan
- b. Sebagai tambahan referensi keilmuan bagi penetapan kebijakan tentang optimalisasi vaksinasi

### **4. Manfaat Bagi Masyarakat**

- a. Sebagai gambaran kebijakan vaksinasi yang lebih menyeluruh dan komprehensif
- b. Sebagai pandangan terhadap optimalisasi vaksinasi oleh pemerintah

## **E. PENEGASAN ISTILAH**

### **1. Vaksinasi**

Vaksinasi adalah suatu cara sederhana, aman serta efektif dalam melindungi orang dari suatu penyakit yang berbahaya. Dengan vaksinasi dapat menciptakan sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi penyakit tertentu dan vaksinasi dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Vaksin mengandung virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan guna untuk menciptakan sistem kekebalan tubuh. Akan tetapi vaksin tidak menyebabkan penyakit ataupun beresiko terjadinya komplikasi. Pemberian vaksin dapat berupa suntikan, oral, dan disemprotkan ke hidung (WHO, 2020).

Vaksin adalah Suatu produk biologik yang terbuat dari kuman, komponen kuman, atau racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan dan berguna untuk merangsang kekebalan tubuh seseorang. Vaksinasi adalah proses pemberian vaksin melalui disuntikkan maupun

diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Vaksinasi juga dapat diartikan sebagai pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sepenuhnya sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan (Fauzia & Hamdani, 2021).

Adapun cara kerja vaksin di antaranya:

- 1) Vaksin adalah produk biologis yang diberikan kepada seseorang untuk melindunginya dari penyakit yang melemahkan, bahkan mengancam jiwa.
- 2) Vaksin akan merangsang pembentukan kekebalan terhadap penyakit tertentu pada tubuh seseorang
- 3) Tubuh akan mengingat virus atau bakteri pembawa penyakit, mengenali dan tahu cara melawannya. (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional : 2021)

## **2. Optimalisasi**

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan (Alfreda, 2021). Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi,

menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan (Jamroni, 2021). Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.

## **F. LANDASAN TEORI**

### **1. Program Vaksinasi**

#### **a. Definisi Vaksin**

Vaksin berasal dari Bahasa latin vacca yang berarti sapi dan vaccinia yang berarti cacar sapi. Vaksin adalah suatu bahan antigenik yang berguna untuk menciptakan kekebalan aktif pada suatu penyakit. Hal ini menjadikan vaksin dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi dari organisme alami ataupun organisme liar. Vaksin dapat berupa virus ataupun bakteri yang sudah dilemahkan dan dapat berupa organisme mati atau hasil-hasil pemurniannya. Jika terdapat serangan pathogen seperti virus, bakteri ataupun toksin maka vaksin akan mempersiapkan sistem kekebalan tubuh manusia atau hewan. Dengan pemberian vaksin manusia dapat merangsang sistem imunologi tubuh sehingga membentuk antibodi yang dapat melindungi tubuh dari penyakit (Ahyar & Muzir, 2019).

Vaksinasi adalah suatu cara sederhana, aman serta efektif dalam melindungi orang dari suatu penyakit yang berbahaya. Dengan

vaksinasi dapat menciptakan sistem kekebalan tubuh terhadap infeksi penyakit tertentu dan vaksinasi dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Vaksin mengandung virus atau bakteri yang telah dilemahkan atau dimatikan guna untuk menciptakan sistem kekebalan tubuh. Akan tetapi vaksin tidak menyebabkan penyakit ataupun beresiko terjadinya komplikasi. Pemberian vaksin dapat berupa suntikan, oral, dan disemprotkan ke hidung (WHO, 2020b). Dalam pencegahan COVID-19 Indonesia mengembangkan vaksin yang ideal untuk pencegahan infeksi SARSCoV-2 yaitu dengan menggunakan berbagai platform seperti vaksin inaktivasi (inactivated virus vaccines), vaksin virus yang dilemahkan (live attenuated), vaksin vector virus, vaksin asam nukleat, virus-like vaccine, dan vaksin subunit protein.

Vaksin atau yang sering kali dikenal dengan nama imunisasi telah lama beredar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari vaksin hepatitis B yang diberikan kepada bayi yang baru lahir untuk memberikan kekebalan imunitas kepada bayi tersebut, sehingga peluang hidup sehat lebih besar, serta diikuti oleh berbagai jenis vaksin lain guna memberikan kekebalan imunitas bagi bayi agar mampu tumbuh sehat dan memberikan peluang hidup yang lebih panjang (Kementerian Kesehatan RI, 2016). Vaksin sendiri berasal dari bagian bakteri atau virus yang menyerang manusia, yang mana bagian tersebut dilemahkan dan disuntikkan ke dalam tubuh manusia dengan harapan tubuh akan membentuk antibodi terhadap bentuk bakteri atau virus

serupa untuk kemudian mampu menciptakan imunitas terhadap paparan bakteri atau virus yang asli. Oleh karena itu, vaksin merupakan bagian penting dalam peradaban manusia dalam menghadapi penyakit mematikan dan menghindari penyebaran wabah penyakit mematikan (WHO, 2019).

#### **b. Tujuan Vaksinasi COVID-19**

Menurut (Dirjen P2P Kemenkes RI, 2021) vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:

- 1) Mengurangi transmisi/penularan dari COVID-19
- 2) Menurunkan akan kesakitan dan angka kematian akibat dari COVID-19
- 3) Meningkatkan kekebalan tubuh masyarakat
- 4) Melindungi masyarakat dari COVID-19 sehingga masyarakat mampu produktif secara sosial dan ekonomi.

#### **2. Manfaat Vaksinasi**

Menurut Alfreda (2021) Adapun manfaat vaksin untuk pengendalian penyakit :

- a. Pemberantasan Penyakit Untuk  
memberantas adanya penyakit, maka jumlah populasi di setiap wilayah dunia yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang baik haruslah tinggi dan dalam periode yang panjang, juga disertai pengawasan yang memadai.
- b. Eliminasi Penyakit

Kunci dari pencapaian untuk eliminasi jenis penyakit adalah 95% dari jumlah populasi memiliki kekebalan tubuh melalui vaksinasi dua dosis.

c. Kontrol Mortalitas, Morbiditas, dan Komplikasi

Vaksin sangat efisien dalam melindungi setiap orang jika belum terpapar oleh suatu penyakit. Vaksinasi yang dilakukan sebelum bayi terkena paparan suatu penyakit dengan beberapa antigen adalah landasan program imunisasi untuk melawan jenis-jenis penyakit pada masa kanak-kanak. Vaksin juga dapat melindungi individu ketika diberikan setelah terpapar oleh penyakit tersebut, contohnya rabies, hepatitis B, hepatitis A, campak dan varicella.

d. Menurunkan Tingkat Keparahan Dari Suatu Penyakit

Jika individu sudah di vaksinasi dan terkena suatu penyakit, maka penyakit yang dialami akan lebih ringan dibandingkan jika orang tersebut belum di vaksinasi.

e. Pencegahan Infeksi

Selain untuk mencegah seseorang terserang suatu penyakit, beberapa vaksin juga dapat melindungi terhadap infeksi. Vaksin Hepatitis A telah terbukti sama efektifnya (lebih dari 90% perlindungan) terhadap penyakit simtomatik dan infeksi tanpa gejala. Pencegahan lengkap infeksi jenis vaksin persisten telah dibuktikan untuk vaksin human papillomavirus (HPV). Perlindungan ini disebut sebagai "Mensterilkan Kekebalan"

### 3. Optimalisasi Program Vaksinasi

Kata “program” berasal dari bahasa Inggris *programme* atau *program* yang berarti acara atau rencana. Menurut Zein (2021) ada dua pengertian untuk istilah “program”: Program dapat diartikan dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. ”Program” apabila dikaitkan langsung dengan evaluasi program maka program diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Lebih lanjut Zein (2021) mengatakan bahwa ada tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan program, yaitu (1) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (2) terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan, dan (3) terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang. Program diartikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang dapat disebut sebagai sistem yang didalamnya terdapat rangkaian kegiatan yang dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan.

Upaya pemerintah dalam memberikan vaksin kepada masyarakat sebagai langkah preventif dalam memutus rantai penyebaran COVID-19-19. Namun dalam pelaksanaannya banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat karena beberapa alasan tertentu, antara lain perihal keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19 berkembangnya dugaan atas tidak

halalnya vaksin, terutama jenis Sinovac, adalah karena kandungan Vero cell dari ginjal Kera Hijau Afrika yang dianggap tidak aman dan haram bagi manusia. Kendala berikutnya adalah anggapan bahwa vaksin COVID-19 yang akan diberikan secara massal adalah program vaksinasi yang hanya ditujukan untuk uji klinis semata. Belum lagi ada kelompok masyarakat kita yang masih memiliki pola pikir yang fatalis sehingga bukan hanya menolak divaksinasi, mereka bahkan banyak tidak percaya bahwa COVID-19 itu nyata.

Kondisi ini yang kemudian membuat pemerintah menerapkan ketentuan pengenaan sanksi administrasi berupa penundaan atau penghentian jaminan sosial bagi masyarakat yang menjadi sasaran penerima vaksin namun tidak mengikuti vaksinasi (Pasal 13A ayat (4) huruf a Perpres No. 14 Tahun 2021). Namun ketentuan ini mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak karena secara substansial bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UU SJSN yang menyebutkan bahwa jaminan kesehatan adalah setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Artinya, pemerintah tidak dapat serta merta melakukan penundaan atau penghentian jaminan sosial jika peserta tetap membayar iuran yang sudah ditetapkan. Terlebih ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud diatur melalui peraturan presiden, padahal dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menerangkan bahwa pembatasan

terhadap hak asasi manusia atas dasar kepentingan umum hanya dimungkinkan melalui undang-undang.

Sehingga, perlu ada pendekatan lain dari pemerintah tanpa harus menggunakan pendekatan yang bersifat memaksa dan agar supaya tidak melanggar peraturan perundang-undangan di atasnya. Pendekatan yang harus dilakukan tersebut adalah pendekatan socio-cultural atau pendekatan budaya, mengingat bahwa karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam secara sosial-budaya. Selain itu, aspek sosial budaya dipercayai memiliki keterkaitan erat dengan meluasnya wabah penyakit atau paling tidak suatu penyakit bisa berkembang menjadi wabah atau pandemi karena perilaku budaya masyarakatnya.

Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

a) Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

b) Alternatif Keputusan

Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

c) Sumberdaya yang Dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi. Manfaat optimalisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi tujuan
- 2) Mengatasi kendala
- 3) memecahkan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
- 4) Pengambilan keputusan yang lebih cepat

#### 4. Peran Pemerintah Dalam Vaksinasi

Diakui atau tidak, terpaan pandemi COVID-19 ini sangat kuat menampar keamanan banyak negara. COVID-19 dalam laporan organisasi internasional akan menjadi pemicu resesi global (Inman, 2020). Ini ibarat fenomena yang terjadi di awal abad ke-20 saat dunia diguncang wabah Spanish Influenza dan menyebabkan jutaan orang menemui kematian. Penyakit ini juga menimbulkan great depression dan mampu menghentikan perang dunia I (Keagen, 2020; Whiting, 2020).

Perubahan besar juga terjadi di era yang lebih kontemporer seperti mewabahnya virus yang menyebabkan sakit Swine Flu. Flu jenis ini bermula di Amerika Serikat, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tahun 2009. Seperti halnya COVID-19, flu jenis ini juga telah menyebabkan jatuhnya korban sakit dan meninggal dunia. Akibat ekonomi yang ditimbulkan cukup besar dan mengakibatkan kontraksi ekonomi global yang serius (Aubin, 2019). Flu ini ikut membidani lahirnya sistem nasional pelayanan vaksin, khususnya di Amerika Serikat (Calmes & McNeil, 2019; Purwanto & Emilia, 2020).

Vaksin 19 jika dipandang dalam kaca mata ekonomi politik bukan hanya sekedar obat atau alat peningkat imunitas tubuh dari penularan COVID-19 semata. Vaksin COVID-19 juga berasosiasi dengan kepentingan ekonomi politik banyak negara. Didalamnya terkandung dominasi kekuasaan bahkan hegemoni dan infiltrasi kepentingan pasar suatu negara.

Dengan kata lain, vaksin COVID-19 berkorelasi terhadap kepentingan negara dalam kerangka menciptakan sumber-sumber kekayaan baru dan meningkatkan pendapatan. Keberadaan vaksin COVID-19 juga - meminjam istilah Caporaso dan Lavine (2015) - merupakan bentuk dari “kekuasaan yang terkondisikan”. Sebab dalam hal ini negara membangun relasi kekuasaan dengan entitas swasta (perusahaan, kapitalis dan organisasi pekerja dan konsumen) untuk sama-sama memproduksi dan mendistribusikan kekayaan.

Kekuasaan yang terkondisi pada dasarnya merupakan situasi dalam tatanan sosial yang bekerja sedemikian rupa sehingga memuaskan kebutuhan dari beberapa kalangan tertentu dan menyesatkan kesaadran dari kalangan lain, dan mengira bahwa kepentingan dari kalangan yang diuntungkan adalah sama dengan kepentingan mereka sendiri (Caporaso & Levine, 2015).

Negara, dengan demikian, bukanlah aktor tunggal yang netral. Negara adalah ensambel atau kelompok kelembagaan (Hameiri & Jones, 2016), yang mencerminkan dan menanamkan hubungan kekuasaan yang berkembang secara historis. Negara mendistribusikan kekuasaan dan sumber daya. Kebijakankebijakan negara mencerminkan bagaimana kekuatan-kekuatan sosial yang paling berkuasa menyepakati pembagian kekuasaan dan akses pada sumber daya (Choiruzzad, 2020).

Kekayaan biasanya dihubungkan dengan uang, tanah, kepemilikan atas rumah dan barang-barang konsumsi, serta berbagai macam investasi. Namun, menurut Caporaso dan Levine, kekayaan yang dimaksud lebih tepatnya adalah kepemilikan dan kendali terhadap kapital produktif. Kepemilikan dan kendali terhadap kapital produktif akan membuat kapitalis menguasai banyak orang (Caporaso & Levine, 2015). Bagaimana dengan Indonesia? Sayangnya, dalam batasan kepentingan secara besar, Indonesia adalah negara konsumen. Jikapun Indonesia masuk didalam konteks menciptakan kekayaan yang terkondisikan itu lebih kepada agar vaksin COVID-19 19 bisa diterima dan diproses didalam masyarakat

sendiri. Irisan seperti itu tidak bisa menempatkan negara sebagai entitas produksi, tetapi hanya sebatas pada entitas distribusi. Itulah mengapa, pemerintah sejauh ini masih terus melakukan sosialisasi agar vaksin COVID-19 bisa didistribusikan secara luas ke masyarakat dan diserap untuk difungsikan secara luas pula.

Sejauh ini, vaksin COVID-19 yang akan didatangkan oleh pemerintah Indonesia, porsi terbesarnya adalah impor. Meski ada penyertaan perusahaan dalam negeri (BUMN) didalamnya, khususnya dalam aspek transfer teknologi dan pengetahuan (*transfer of technology and knowledge*) namun produksi secara massif masih terbatas dan butuh effort yang konsisten. Dengan kondisi begini, Indonesia tidak memiliki tawar menawar yang kuat, meski pangsa pasar Indonesia sangat besar. Di tengah wabah COVID-19 yang terus meningkat, Indonesia tidak punya pilihan selain menerima apa adanya.

Dalam logika kekuasaan seperti ini memang Indonesia dalam kedudukan yang kurang menguntungkan. Di mata negara produsen COVID-19, Indonesia berada dalam posisi tawar yang lemah, yang kemudian kelemahan diri ini dimanfaatkan oleh negara lain untuk menawarkan dengan posisi harga yang tinggi (Caporaso & Levine, 2015).

Dalam kondisi yang membutuhkan, ditambah kelangkaan produk dan permintaan yang sudah pasti tinggi, maka mekanisme pasar memang berlaku. Persoalan di dalam negeri adalah bagaimana agar ketersediaan terhadap vaksin juga terjaga. Maka, langkah untuk membeli di awal dan

menjalin kontrak pembelian dengan perusahaan asing menjadi pilihan pemerintah.

Fungsi pemerintahan memang seperti itu, yakni memiliki tanggung jawab domestik untuk menjamin kebutuhan masyarakat (Rasyid, 2000). Namun, pemerintah tak seharusnya hanya memikirkan soal ketersediaan. Ada hal krusial lain yang tak kalah genting, yakni memastikan bahwa pemerintah tidak menjadikan rakyat sebagai pangsa pasar untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dan bertindak selayaknya perusahaan yang berupaya memperoleh kekuasaan pasar (market power) (Caporaso & Levine, 2015).

Pemerintah diharapkan tidak mengeluarkan kebijakan yang kontraproduktif dengan tujuan bernegara dan mengkonstruksikan tujuan penyelesaian COVID-19 dengan memaksakan logika pasar kepada rakyat (Chabibi, 2019). Jika menggunakan logika pasar, maka pasar memiliki kekuasaan “mengendalikan” negara untuk menyediakan semua komoditas yang mendukung keberlangsungan pasar (kapitalisme). Dukungan tersebut berupa pembangunan infrastruktur, kebijakan kompetisi dan segala urusan yang terkait dengan kepentingan pasar. Oleh karena itu, negara harus memiliki prinsip-prinsip didalam penentuan regulasi terkait mekanisme pasar, yaitu: (1) mengenai efisiensi, pasar harus dibangun secara sosial melalui serangkaian peraturan yang disepakati atau diberlakukan dalam permainan. (2) tidak ada mekanisme pemasaran alami atau spontan sehingga perlu diatur sebaik mungkin oleh pemerintah. (3) prinsipnya

sederhana, kalau pasar itu menggunakan prinsip equilibrium maka ia adalah hasil dari kepatuhan terhadap sebuah peraturan (Boyer & Drache, 1996). Dengan kata lain, negara harus mengambil peran besar untuk memastikan kebijakan lebih terarah dan tuntas.

Pemerintah harus melihat kondisi saat ini dimana rakyat masih dalam kondisi terpuruk akibat dampak COVID-19 ini. Kenormalan baru hanya merubah budaya keseharian perilaku dan aktivitas, tanpa bisa merubah keadaan ekonomi masyarakat pada kenormalan yang layak

#### **5. Pendekatan Pemerintah**

Institusionalisme adalah sebuah studi yang mempelajari tentang asal-usul, proses bekerja, dampak, dan strategis reformasi terhadap institusi-institusi yang ada di masyarakat. Institusi merupakan basis dari berbagai bentuk interaksi antarmanusia, termasuk politik dan kebijakan publik. Lebih lanjut disebutkan bahwa bahasa adalah salah satu bentuk dari persepakatan komunal (Convention) yang pada akhirnya terformalisasi membentuk institusi. Proses formalisasi tersebut kemudian disebut dengan istilah “institusionalisasi”. Bahkan, terbentuknya negara itu sendiri adalah hasil dari proses institusionalisasi (Parawangsyah, 2020)

Hal senada sebelumnya pernah diungkapkan oleh Ferdinand Tonnies yang mengidentifikasi terbentuknya negara yang dimulai dari komunitas-komunitas moral (*Gemeinschaft*) menjelma menjadi sebuah masyarakat yang lebih terstruktur dan sistematis (*Gesellschaft*), dan pada akhirnya membentuk sebuah negara (*Staat*). Oleh karena negara

merupakan hasil dari sebuah proses institusionalisasi, maka semua produk yang dihasilkannya, termasuk kebijakan publik, juga tak lepas dari ranah kajian institusionalisme (Parawangsyah, 2020)

Institusionalisme menempatkan aspek kualitas kelembagaan sosial politik sebuah negara sebagai penentu keberhasilan pembangunan. Kelembagaan yang dimaksud di sini mencakup konstitusi, regulasi, kapasitas organisasi legislative, yudikatif dan birokrasi, serta berbagai mekanisme formal penentuan program prioritas dan alokasi anggaran yang ada di sebuah negara. Peneliti lainnya, Helmke dan Levitsky membedakan institusi formal dan informal dari lima sudut pandang. Pertama, dari pembentukannya. Kedua, dari komunikasinya. Ketiga, dari penegakannya. Keempat, dari dokumentasinya. Dan Kelima, dari kodifikasinya.

Terdapat tiga model utama proses institusionalisasi dalam mengidentifikasi proses kebijakan publik. Pertama, *model Rational Choice Institutionalism (CRI)* yang pertama kali dikembangkan oleh Anthony Downs, melihat bahwa proses kebijakan berlangsung dalam kerangka proses rasional. Kedua, model incremental (*Historikal Institusionalisme*) yang dikembangkan oleh Charles Lindblom menekankan adanya keberlanjutan dan akumulasi pada proses kebijakan publik. Dan Ketiga, model organisasi birokratis yang dikembangkan Graham Allison menekankan pentingnya institusi dalam proses kebijakan publik.

Selain itu, Thissen dan Warren menambahkan dua model lagi yaitu model politik dan diskursif (*Discursive institutionalism*) dan model

*Political game* yang melihat arena kebijakan publik terdiri dari para aktor yang masing-masing memiliki kekuatan relative seimbang serta memiliki sumber daya masing-masing (*polisentris*). Selanjutnya dia mengembangkan kelima tipologi proses kebijakan tersebut ke dalam lima kategori, yaitu kebijakan publik rasional, politik, *diskursif*, *integrative*, dan institusional. Pengembangan ragam model kebijakan publik tersebut dilihat dari tiga perspektif, yaitu karakteristik kebijakan, proses kebijakan publik, dan desain kelembagaannya.

## **G. DEFINISI OPERASIONAL**

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2014). Definisi operasional adalah sebagai unsur penelitian yang merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel diukur dalam rangka memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan, sehingga memerlukan operasionalisasi dari masing-masing konsep digunakan dalam menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dengan kata-kata yang dapat diuji dan diketahui kebenarannya (Imron Wafdurrahman, 2015). Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah :

### **1. Optimalisasi Program Vaksinasi**

Optimalisasi program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menyukseskan vaksinasi secara regional dan nasional. Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi wabah pandemi akibat penyebaran virus Covid-19

adalah dengan melakukan percepatan program vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Adapun tujuan percepatan vaksinasi yang dilakukan diantaranya yaitu sebagai upaya untuk mengurangi transmisi/penularan Covid-19, mengurangi atau menurunkan angka kesakitan dan mortalitas yang diakibatkan oleh Covid-19, untuk mencapai kekebalan komunal dari kelompok di masyarakat (herd immunity), dan melindungi serta menjaga masyarakat dari virus Covid-19 sehingga tetap aktif sekaligus produktif baik secara sosial maupun ekonomi (Wahyuni & Arifiati, 2021).

Program vaksinasi dianggap sebagai kunci dalam mengakhiri pandemi karena dapat digunakan dalam rangka mengurangi angka morbiditas dan mortalitas serta membentuk kekebalan kelompok terhadap virus COVID-19 (Saraswati & Sunarta, 2021). Vaksinasi dapat mendukung upaya pencegahan penularan COVID-19. Hal ini lantaran imunitas atau antibodi tubuh telah terbentuk untuk melawan COVID19. Keikutsertaan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mencapai keberhasilan dari tujuan kebijakan vaksinasi COVID-19. Namun kekhawatiran masyarakat akan dampak vaksinasi COVID-19 merupakan gambaran krisis komunikasi di era pandemi saat ini. Sehingga dasar dari komunikasi krisis adalah untuk merespon sesegera mungkin setelah krisis terjadi, melalui transparansi informasi dan kejujuran dengan stakeholders, baik yang terkena efek langsung maupun tidak langsung (Rahmayani & dkk, 2022).

## 2. Pendekatan Pemerintah

Pemerintah harus melihat kondisi saat ini dimana rakyat masih dalam kondisi terpuruk akibat dampak COVID-19 ini. Kenormalan baru hanya merubah budaya keseharian perilaku dan aktivitas, tanpa bisa merubah keadaan ekonomi masyarakat pada kenormalan yang layak dalam upaya optimalisasi vaksinasi. Inti dari Institusionalisme Baru dirumuskan oleh Robert E. Goodin sebagai berikut (Ivan Aditya Mileniawan, 2021) :

- a. Aktor dan kelompok melaksanakan proyeknya dalam suatu konteks yang dibatasi secara kolektif.
- b. Pembatasan-pembatasan itu terdiri dari institusi-institusi, yaitu a) pola norma dan pola peran yang telah berkembang dalam kehidupan sosial, dan b) perilaku dari mereka yang memegang peran itu. Peran itu telah ditentukan secara sosial dan mengalami perubahan terus-menerus.
- c. Sekalipun demikian, pembatasan-pembatasan ini dalam banyak hal juga memberi keuntungan bagi individu atau kelompok dalam mengejar proyek mereka masing-masing.
- d. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor yang membatasi kegiatan individu dan kelompok, juga memengaruhi pembentukan preferensi dan motivasi dari aktor dan kelompok-kelompok.
- e. Pembatasan-pembatasan ini mempunyai akar historis sebagai peninggalan dari tindakan dan pilihan-pilihan masa lalu.
- f. Pembatasan-pembatasan ini mewujudkan, memelihara, dan memberi peluang serta kekuatan yang berbeda kepada individu dan kelompok masing-masing.

Institusionalisme Baru menjadi sangat penting bagi negara-negara yang baru membebaskan diri dari cengkeraman suatu rezim yang otoriter serta represif. Dalam proses ini nilai kembali memainkan peran penting. Perbedaan Institusionalisme Baru dengan Institusionalisme Lama ialah perhatian Institusionalisme Baru lebih tertuju pada analisis ekonomi, kebijakan fiskal dan moneter, pasar dan globalisasi ketimbang pada masalah konstitusi yuridis. Dapat dikatakan bahwa ilmu politik, dengan mengembalikan fokus atas negara termasuk aspek legal/institusionalnya, telah mengalami suatu lingkaran penuh (*full circle*) (Ivan Aditya Mileniawan, 2021). Berikut adalah penjabaran dari definisi operasional

## **H. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. JENIS PENELITIAN**

Penelitian dalam kehidupan masyarakat akan sangat bersentuhan dengan kebenaran dari kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga untuk mengarahkan suatu penelitian kepada hasil dibutuhkan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini akan mengeksploitasi dan memahami makna ataupun dampak yang dirasakan oleh masyarakat atas kebijakan pemerintah (Jamroni, 2021). Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data (Wahyuni et al.,

2021) Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Sugiono mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Sugiyono,2015).

Adapun pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan studi kasus, yang dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan (Wahyuni et al., 2021) Selain itu dalam pendekatan kualitatif ini juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan terbuka, pendekatan-pendekatan yang berkembang dinamis, dan datanya tekstual. Disamping itu mengumpulkan data dari para partisipan, meneliti konteks atau setting partisipan, dan kolaborasi dengan partisipan (John W. Creswell 2013).

Pendekatan ilmu politik dalam penelitian ini menggunakan pendekatan institusionalisme baru, karena menurut Miriam budiardjo pendekatan institusionalisme baru menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi (Alfreda, 2021)

Institusionalisme Baru merupakan penyimpangan dari Institusionalisme Lama. Institusionalisme Lama mengupas lembaga-

lembaga kenegaraan seperti apa adanya secara statis. Berbeda dengan itu Institutionalisme Baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Institutionalisme Baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintahan sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu. Bentuk dan sifat dari institusi ditentukan oleh para aktor serta pilihannya (Jamroni, 2021). Pendekatan Institutionalisme Baru menjelaskan bagaimana organisasi institusi itu, apa tanggung jawab dari setiap peran dan bagaimana peran dan institusi berinteraksi (Bappenas, 2021).

## **2. LOKASI PENELITIAN**

Lokasi penelitian terkait dengan “Optimalisasi Program Vaksinasi Melalui Pendekatan Institusi Di Desa Pandak Kecamatan Balong”, dimana studi kasus akan dilaksanakan di Desa Pandak Kecamatan Balong.

## **3. PENENTUAN INFORMAN**

Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti (Heryana, 2015). Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna, Ketua BPD, dan bidan desa, hal ini

didasarkan pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Jadi alasan utama dipilihnya informan tersebut ialah telah sesuainya sumber informasi dengan informasi yang akan dibutuhkan. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber (key informan) informan yang dimaksud adalah perangkat desa di Desa Pandak Kecamatan Balong. Menurut (Parawangsyah, 2020) yang paling tepat dalam penelitian kualitatif adalah sampling yang bertujuan (purposive sampling) yang maksudnya adalah untuk :

- a. Menyaring informasi dari berbagai sumber
- b. Menggali informasi yang akan menjadi dasar bagi rancangan dan teori yang muncul.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki sebagai informan adalah perangkat desa yaitu sebagai berikut:

- a. Warga Desa Pandak Kecamatan Balong.
- b. Perangkat Desa yang bekerja di kantor Desa Pandak
- c. Perangkat Puskesmas Desa Pandak
- d. Terlibat secara langsung/tidak langsung dalam program vaksinasi
- e. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- f. Bersedia menjadi informan.

Pada penelitian ini mengambil 5 (lima) informan dari perangkat desa serta petugas Puskesmas yang dibagi sebagai berikut:

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa : 1 Orang

2. Ketua Karang Taruna : 1 Orang
3. Kepala Desa (Ketua Satgas Covid) : 1 Orang
4. Bidan Desa : 1 Orang
5. Ketua PKK : 1 Orang

#### 4. SUMBER DATA

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder yang kemudian, akan di-review semua data tersebut, diberimaknya dan diolah kedalam kategori-kategori yang melintasi semua sumber data. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi lapangan, Menurut Alfreda, (2021) Pengambilan data lapangan menggunakan dua data sumber, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yang dilakukan dengan observasi maupun wawancara ke instansi-instansi yang terkait. Dengan penentuan narasumber menggunakan teknik purposive sampling, seperti, Puskesmas terkait, serta perangkat desa Pandak Kecamatan Balong.
- b. Data sekunder, berupa pengumpulan informasi tambahan dari dokumen, buku, berita, maupun artikel-artikel yang berhubungan dalam judul dan perumusan masalah dalam penelitian, maupun lampiran-lampiran dan undang-undang yang mengatur kebijakan atau deskripsi dari implementasi kebijakan.

## 5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Data akan dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi.

### a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang terjadi secara langsung antara dua orang atau lebih (Wijanarko, 2007). Tujuan wawancara secara umum yaitu memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2013).

Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam bentuk yang disebut wawancara mendalam (*in-depth interviewing*). Teknik wawancara ini yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif, terutama pada penelitian lapangan. Tujuan wawancara adalah untuk bisa menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi,

perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan untuk merekonstruksikan beragam hal (Sugiyono, 2013).

Interview atau wawancara mendalam bertujuan untuk saling menyelami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian. Peneliti mengadakan kegiatan untuk mengumpulkan dan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi bahan kajiannya. Di sini terjadi interaksi antara peneliti dengan orang yang diteliti. Orang yang diteliti juga berhak tahu si peneliti dengan seluruh jati dirinya, mengetahui untuk apa tujuan penelitian, mengetahui kegunaan penelitian. Setelah orang yang diteliti mempercayai peneliti, kemungkinan data yang diperoleh peneliti akan semakin lengkap.

Proses wawancara dalam penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan dengan cara tak terstruktur, karena peneliti tidak mengetahui secara tepat mengenai apa yang sebenarnya hendak dituju. Dengan demikian tujuan wawancara yang dilakukan untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya yang mengarah kedalaman informasi dandilaksanakan secara informal. Dengan demikian wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat terbuka (open-ended) dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal terstruktur, guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasinya secara lebih jauh, lengkap, dan mendalam.

Selanjutnya pada tahapan-tahapan wawancara, terbagi menjadi beberapa tahapan wawancara. Tahapan pertama, peneliti menentukan siapa saja yang akan diwawancarai, hal ini perlu dilakukan karena peneliti harus mengetahui siapa saja yang memiliki informasi yang benar dengan fokus yang diteliti. Tahapan kedua, peneliti perlu menyesuaikan diri, mengetahui, memahami, dan mendalami kepribadian serta karakter informan. Dengan mengetahui itu semua agar informan dalam memberikan informasi dapat mengalir sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Tahap ketiga, pada saat mengadakan pertemuan dengan informan, peneliti perlu mengetahui dan melihat situasi, kondisi, dan konteks, ini perlu dipahami agar proses wawancara bisa disesuaikan dengan kondisi dan situasi informan. Tahap keempat, peneliti harus bisa mengusahakan wawancara yang dilakukan dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya dan informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian, tetapi dalam proses wawancara peneliti harus bisa menjaga kondisi wawancara yang tidak kelihatan formal. Wawancara yang dilakukan dalam suasana santai, nyaman, dan lancar. Pada proses ini usahakan peneliti jangan sekali-kali memotong pembicaraan, dan berusaha menjadi mitra bicara dan pendengar yang baik, sopan, tetapi jadilah pendengar yang kritis. Tahap kelima atau terakhir, dalam mengadakan wawancara dengan segala hasilnya, buatlah simpulan sementara dan konfirmasi simpulan itu dengan informan.

Tujuannya agar informasi yang diberikan oleh informan dengan yang diterima peneliti ada kesamaan persepsi.

Untuk secara khusus wawancara memiliki tujuan diantaranya:

Untuk menggali dengan harapan memperoleh informasi atau data dari orang pertama

Untuk menggali dengan harapan memperoleh informasi atau data dari orang pertama

- 1) Untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data.
- 2) Untuk mendapatkan informasi dengan menguji hasil pengumpulan data yang lainnya.
- 3) Untuk mendapatkan informasi dengan menguji hasil pengumpulan data yang lainnya.

Menurut Khatami, wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu yang mana percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak atau lebih, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya), sedangkan menurut Badri (2021), wawancara merupakan metode yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba memperoleh informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara langsung (Khatami, 2021).

b. Observasi

Observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mengamati secara langsung. Dilapangan observasi bisa dilakukan terhadap objek yang nyata dan bisa diamati secara langsung. Metode pengumpulan data satu ini sangat mudah dilakukan, sehingga banyak yang mengunggulkannya dalam penelitian. Menurut Nawawi dan Martini pengertian observasi adalah proses kegiatan mengamati, yang diikuti pencatatan secara urut (Utami, 2014). Hal ini terdiri atas beberapa unsur yang muncul dalam fenomena didalam objek yang diteliti. Hasil dari proses tersebut dilaporkan dengan laporan yang sistematis dan sesuai kaidah yang berlaku (Bagus Hidayatullah, 2021).

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan. Dengan melakukan observasi peneliti dapat mengamati objek penelitian dengan lebih cermat dan detail, misalnya peneliti dapat mengamati kegiatan objek yang diteliti. Pengamatan itu selanjutnya dapat dituangkan ke dalam bahasa verbal.

Menurut Arikunto (2010) menyatakan bahwa "*through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*". Melalui observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda serta

rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan pengolahan dan penyimpanan informasi dibidang pengetahuan pemberian atau pengumpulan bukti dari keterangan seperti gambar, kutipan, guntingan koran dan bahan refrensi lain (Tandayu, 2017).

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek (Hst, 2020). Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Umulkulsum & Suaji, 2020).

Dengan metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti : gambaran umum sekolah, struktur organisasi sekolah dan personalia, keadaan guru dan peserta didik, catatan-catatan, foto-foto dan sebagainya. Metode

dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara (Umulkulsum & Suaji, 2020).

## **6. ANALISIS DATA**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman atau bisa di sebut dengan interactive model (Wahyuni et al., 2021) Teknik analisis ini dipilih berdasarkan kesesuaian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Yang memiliki beberapa komponen kerja yang harus dilakukan yaitu:

- a. Pengumpulan Data dilakukan dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategori yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.
- b. Reduksi Data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, pada awal misalnya permasalahan, pengumpulan data yang diperoleh (Alfreda, 2021). Data yang peneliti peroleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

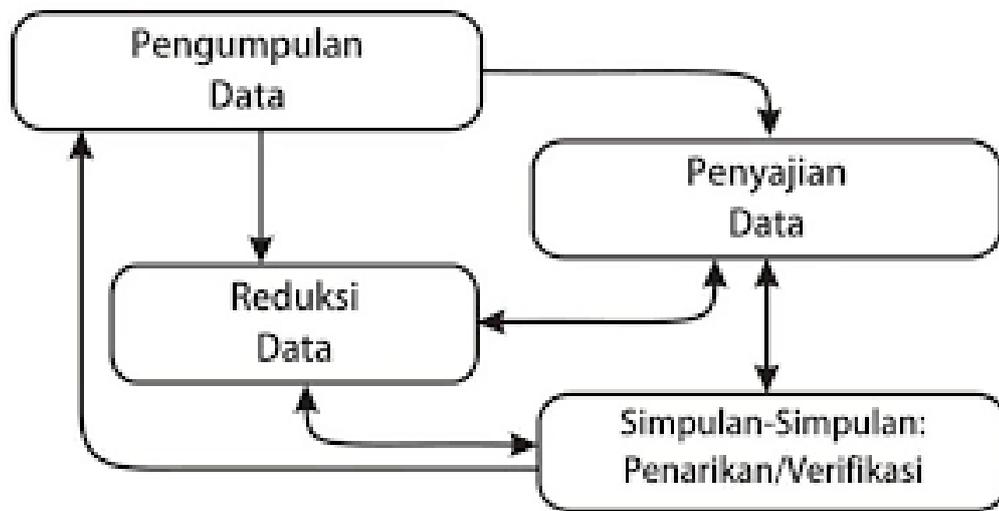
pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

c. Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain teks yang naratif juga dapat berupa *grafik, matrik, network* (jaringan kerja) dan *chart*. Penyajian Data merupakan proses penyusunan atau merancang seluruh data secara teratur agar mudah dianalisis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses penarikan kesimpulan. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal serupa menjadi kategori atau kelompok. Dalam proses ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.

d. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti

yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Menarik Kesimpulan merupakan kegiatan menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji kekokohan dan kecocokannya. Selain memberi kesimpulan, peneliti juga akan memberikan saran-saran sebagai rekomendasi tentang studi lanjutan dan kebijakan-kebijakan yang akan datang (Wahyuni et al., 2021).

Keterkaitan antara tiga tahapan proses dan tujuh langkah penelitian kualitatif ditunjukkan pada gambar berikut ini:



(sumber : <https://www.kibrispdr.org/>)

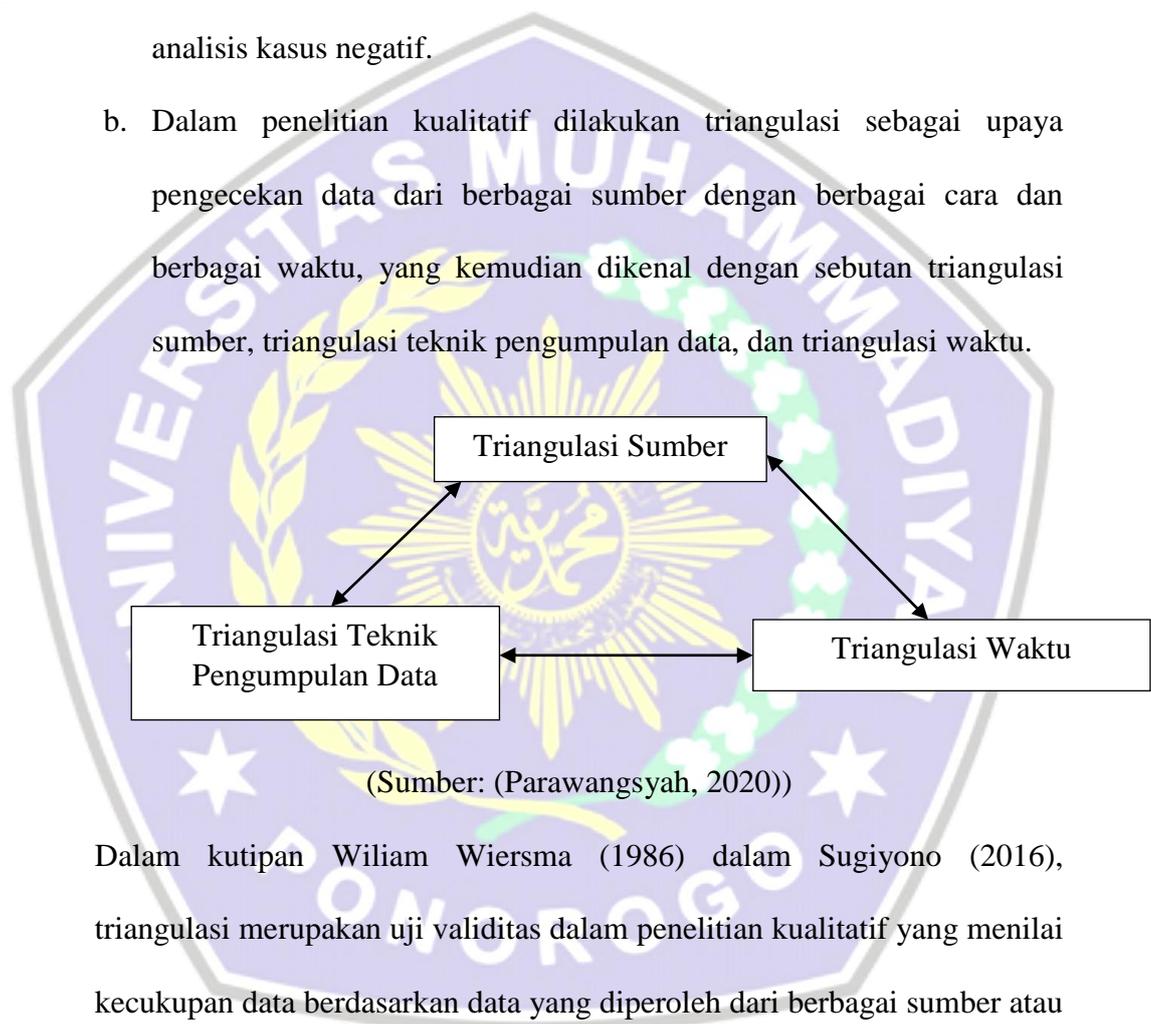
## 7. UJI KEABSAHAN DATA

Dalam suatu penelitian, uji keabsahan data identik dengan uji validitas dan uji reliabilitas (Ivan Aditya Mileniawan, 2021). Uji validitas merupakan suatu uji untuk menentukan hasil data penelitian yang disampaikan oleh peneliti tidak memiliki perbedaan dengan data yang terdapat di lapangan. Suatu data disebut “valid” jika data tersebut tidak berbeda sama sekali dengan data objek yang diteliti. Sedangkan uji reliabilitas pada penelitian kualitatif merupakan uji yang bersifat majemuk dan dinamis sehingga tidak konsisten dan berulang seperti semula. Hasil penelitian kualitatif dapat dinyatakan sah, valid, dan benar jika telah dilakukan uji keabsahan data yang meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) (Sugiyono, 2016).

### a. Uji *credibility*

Uji kredibilitas disebut juga sebagai uji validitas internal. Uji kredibilitas merupakan uji yang berkaitan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Dalam uji kredibilitas dilakukan beberapa langkah diantaranya perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, dan analisis kasus negatif.

- b. Dalam penelitian kualitatif dilakukan triangulasi sebagai upaya pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, yang kemudian dikenal dengan sebutan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.



(Sumber: (Parawangsyah, 2020))

Dalam kutipan Wiliam Wiersma (1986) dalam Sugiyono (2016), triangulasi merupakan uji validitas dalam penelitian kualitatif yang menilai kecukupan data berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber atau berbagai prosedur. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik sumber sebagai metode triangulasi yang digunakan. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan *crosscheck* data yang diperoleh dari berbagai sumber (Sugiyono, 2016).

a. Uji *transferability*

Disebut juga dengan uji validitas eksternal, yang berkaitan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi tersebut diperoleh. Pengujian ini jika diterapkan pada penelitian kualitatif, hasil penelitian disajikan dalam uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2016).

b. Uji *dependability*

Sebuah penelitian dinyatakan reliabel jika pihak lain mampu mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2016).

c. Uji *confirmability*

Penelitian disebut obyektif jika hasil penelitian telah disepakati oleh massa. Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmabiliti mirip dengan uji dependabiliti/ reliabilitas, sehingga pengujian dilakukan bersamaan. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmabiliti (Sugiyono, 2016).

Untuk menguji validitas data yang diperoleh dari informan penelitian, peneliti menggunakan teknik uji kredibilitas yang berupa triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu,

dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. (Ivan Aditya Mileniawan, 2021)

Dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah triangulasi melalui sumber. Menurut Moleong triangulasi sumber maksudnya membandingkan, mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi (Arikunto, S. 2019)
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang sepanjang waktu (Arikunto, S. 2019)
- c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan orang lain, perbandingan ini akan memperjelas perselisihan atas latar belakang alasan-alasan terjadinya perbedaan pendapat maupun pandangan orang (Arikunto, S. 2019)
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan (Arikunto, S. 2019)